

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang dalam pengertian geografis didefinisikan sebagai wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak.¹ Namun ruang dalam perspektif sosiologis diartikan sebagai yang diproduksi dan direproduksi dan kemudian merepresentasikan situs perjuangan. Terdapat tiga elemen ruang dalam pandangan sosiologis. Pertama, terdapat “praktik-praktik sosial.” Mereka berkisar dari kegiatan rutin individu sampai penciptaan sistematis dari zona dan wilayah. Praktik-praktik sosial tersebut terkonsentrasi sepanjang waktu dalam suatu lingkungan buatan dan dalam suatu lanskap. Praktik-praktik sosial paling penting adalah tentang kepemilikan dan bentuk-bentuk lain dari modal. Kedua, terdapat representasi-representasi ruang, suatu bentuk pengetahuan dan praktik yang menyusun dan merepresentasikan ruang, khususnya melalui teknik perencanaan dan negara. Ketiga, terdapat ruang-ruang representasi atau suatu pengalaman kolektif tentang

¹ D.A Tiasnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf, 1997, *Pranata Pembangunan*, (Bandung: Universitas Parahiayang), hlm. 6.

ruang. Ini termasuk pembedaan simbolis dan menghasilkan bentuk-bentuk perlawanan individual dan kolektif.²

Kontestasi ruang sosial pada masyarakat pinggiran perkotaan menjadi pembahasan isu yang cukup menarik, terlebih penelitian yang dilakukan penulis adalah di ibukota Jakarta dan cenderung pada daerah pesisir Jakarta, yakni Jakarta Utara. Penelitian lainnya terhadap isu kontestasi ruang sosial pada masyarakat pinggiran kota di daerah pesisir Jakarta juga diangkat oleh Asep Suryana³, ia menjelaskan fenomena ironi keberdayaan yang dihadapi masyarakat pesisir Jakarta, yakni pada masyarakat Bugis. Komunitas pesisir Jakarta relatif berdaya lantaran bertumpu pada ruang kewargaan yang tengah mereka bangun di tataran mikro. Mereka berperan lebih strategis sebagai subjek aktif dan kreatif, bahkan mampu memanfaatkan berbagai peluang yang dihasilkan oleh kebijakan negara maupun aktivitas perusahaan-perusahaan besar, namun pada tataran makro, posisi mereka amatlah ringkih. Mereka hanya berperan sekunder bahkan tersier, bahkan cenderung tidak diperhatikan dalam proses produksi ruang kota secara makro, dalam kacamata kapitalis maupun pemerintah pusat. Contohnya seperti kasus Mbah Priok. Terjadi bentrokan antara warga, pemerintah, dan perusahaan Pelindo II di mana pemerintah dan perusahaan berupaya untuk menertibkan makam tersebut sebagai dalih untuk

² John Urry, 2017, *Sosiologi Ruang dan Tempat*, (Malang: Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya), Vol. 1 No. 1, hlm. 28-29.

³ Asep Suryana, 2011, *Ruang Kewargaan dan Ironi Keberdayaan Masyarakat Pesisir Jakarta*, (Jakarta: Jurnal Sosialita), Vol. 9 No. 1 hlm 1-13.

mengambil fungsi lahan untuk kepentingan perusahaan, namun warga di daerah tersebut menolak dan menganggap hal itu sama saja dengan penggusuran. Bagi warga, kompleks makam adalah ruang kewargaan (*civic space*) mereka. Kompleks makam telah menjadi arena ruang hidup bagi komunitas muslim lapis bawah. Makam telah berfungsi sebagai arena penyegaran rohani keagamaan sekaligus kapital psikologis responsif dalam rangka menghadapi kehidupan sehari-hari Tanjung Priok yang kian keras. Namun mereka hanya berdaya di jenjang mikro, justru ringkih di tingkat makro. Inilah ironi keberdayaan masyarakat pesisir metropolitan ketika berhadapan dengan intervensi negara dan perusahaan. Ruang (*space*) pun mereka peroleh setelah dilakukan perjuangan fisik-berdarah dan itu pun harus disubordinasikan demi Bergeraknya denyut ekonomi makro.

Hal lain juga terjadi di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Yoppie Christian & Desmiwati⁴ ini menjelaskan tentang persoalan konflik agraria yang terjadi di Pulau Pari yang telah berlangsung lebih dari dua puluh tahun, di mana terdapat tiga pihak utama yang terlibat, yakni masyarakat lokal yang secara diametral berhadapan dengan korporasi wisata yang didukung pemerintah lokal. Pendekatan yang ekonomistik menjadikan sumber-sumber agraria sebagai komoditas ekonomi dan kekuasaan memastikan bahwa komponen-komponen ruang bisa dipisahkan agar ruang sosial dapat direduksi. Pelepasan komponen ruang

⁴ Yoppie Christian dan Desmiwati, 2018, *Menuju Urbanisasi Pulau Kecil: Produksi Ruang Abstrak dan Perampasan*, (Bogor: *Journal of Regional and Rural Development Planning*), Vol. 2 No. 1 hlm. 45-63.

membuka jalan bagi proses perampasan yang bertujuan untuk mengakumulasi sumber daya. Ruang kapital baru diciptakan untuk mengubah sumber agraria menjadi komoditas dan menciptakan tenaga kerja bebas tanpa tanah bagi industri wisata modern ke depan, cara yang digunakan adalah memanfaatkan kekuatan ekstra-ekonomi, hukum, politik, akumulasi pengetahuan serta uang. Perampasan memunculkan perlawanan namun kontestasi ini tidak seimbang sehingga dalam konflik ruang di Pulau Pari ini sangat berpotensi memarginalkan masyarakat lokal.

Kontestasi ruang sosial pada masyarakat pinggiran perkotaan juga terjadi di daerah yang penulis lakukan, di mana terjadi proses pertahanan ruang yang dilakukan oleh masyarakat pinggiran Tanjung Priok dengan cara memproduksi ruang spasial mereka sendiri untuk keberlanjutan hidupnya. Produksi ruang yang dialami oleh masyarakat Jakarta, terutama masyarakat di Tanjung Priok menjadi refleksi dari kondisi ruang yang cukup kompleks atas aktivitas ekonomi, politik, dan sosial budayanya. Tanjung Priok sebagai salah satu kecamatan pada ibukota DKI Jakarta terkenal dengan jalur transportasi lautnya yang menghubungkan perdagangan-perdagangan dunia antar pulau. Bahkan pelabuhan Tanjung Priok telah menjadi salah satu sandaran hidup sebagian besar masyarakat Priok. Aksesibilitasnya yang mudah dan memiliki potensi besar untuk menjadikan masyarakat Tanjung Priok hidup sejahtera ternyata tidak sepadan dengan kondisi realita masyarakat yang ada. Memiliki akses pelabuhan besar justru membuat Priok menjadi salah satu kecamatan yang

sangat padat jumlah anggota penduduknya, mencapai⁵ 395.022 jiwa pada tahun 2018 dan tidak seimbang dengan luas wilayah yang ada yakni 22,5174 km², dengan kepadatan penduduk sebesar 17.542,97 sehingga menyebabkan tingkat persaingan dalam produksi ruang kota yang cukup signifikan bahkan dapat berdampak pada persaingan yang tidak sehat. Pesatnya pertumbuhan Jakarta, khususnya Tanjung Priok, umumnya disebabkan oleh migrasi, dan hal itu melahirkan suatu masyarakat kota yang sangat kompleks menurut ukuran kesukuan, pekerjaan serta kelompok-kelompok sosial.⁶

Gambar 1.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Tanjung Priok, 2018

No.	Kelurahan Subdistrict	Luas Area (Km ²)	Penduduk/Population			Kepadatan Penduduk Density	Rasio Jenis Kelamin Sex Ratio
			Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sunter Agung	7,0226	41 618	41 816	83 434	11 880,78	99,53
2	Sunter Jaya	4,5817	36 880	36 020	72 900	15 911,12	102,39
3	Papanggo	2,8018	23 643	22 933	46 576	16 623,60	103,10
4	Warakas	1,0884	26 971	26 736	53 347	49 014,15	100,88
5	Sungai Bambu	2,3640	18 326	17 543	35 869	15 173,01	104,46
6	Kebon Bawang	1,7270	30 841	29 983	60 824	35 219,46	102,84
7	Tanjung Priok	5,5400	21 205	20 867	42 072	7 594,22	101,62
Tanjung Priok		22,5174	195 538	195 538	395 022	17 542,97	102,02

Sumber/Source : Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara/Population and Civil Registration Service of Jakarta Utara

Sumber: BPS Tanjung Priok, 2020⁷

⁵ Data BPS Kota Jakarta Utara 2018.

⁶ Hans Dieter Evers, 1986, *Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: LP3ES).

⁷ Suhartono, 2019, *Tanjung Priok dalam Angka*, (Jakarta: BPS Kota Administrasi Jakarta Utara), hlm. 61.

Persaingan dalam produksi ruang kota ini menyebabkan kesenjangan sosial dan banyak daerah di wilayah Tanjung Priok menjadi daerah kumuh. Hal ini juga secara tidak langsung dikatakan oleh wakil presiden Jusuf Kalla yang dilansir pada berita CNN Indonesia⁸ di mana beliau mengatakan bahwa Tanjung Priok seperti negara Bangladesh, salah satu Negara yang baru memasuki kategori berkembang berdasarkan penilaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 17 Maret 2018 lalu dan memiliki citra kumuh. Sedangkan definisi dari pemukiman kumuh itu sendiri merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni, dengan ciri-ciri antara lain kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayannya prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya.⁹ Keadaan tata ruang kota yang kumuh ini tentu akan berimplikasi pada produksi ruang dalam sistem bertahan hidup masyarakat setempat, di mana dengan ruangan yang tidak nyaman dan terbatas membuat mereka selalu mencari cara untuk bagaimana akhirnya bisa bertahan hidup dengan kondisi yang seperti itu.

Dalam hal ini, produksi ruang kota masyarakat Tanjung Priok cukup bersaing dalam konstelasi persaingan sosial ekonomi untuk mempertahankan hidupnya. Dari

⁸ Setyo Haji Harjanto, 2019, *Jelajah Jakarta Rasa Bangladesh di Tanjung Priok*, (Jakarta: CNN Indonesia), diakses pada laman <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190129183043-20-364844/jelajah-jakarta-rasa-bangladesh-di-tanjung-priok> Senin, 25 Maret 2019 pukul 13.45 WIB.

⁹ Niken F dan Ruli P S, 2014, *Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk Jakarta Barat*, (Surabaya: Jurnal Teknik Pomits), Vol 3 No. 2 hlm 240-244.

segi ekonomi, masyarakat Tanjung Priok mayoritas bekerja sebagai pedagang, buruh pelabuhan dan pelaut. Dalam hal berdagang, biasanya mereka berdagang barang, makanan, hingga pada kebutuhan pokok. Hal ini diakibatkan karena tingkat persaingan ekonomi dalam mencari pekerjaan cukup sulit, disertai dengan kondisi tingkat pendidikan yang rendah, sehingga masyarakatnya memutuskan untuk berdagang. Selain itu, letaknya yang dekat dengan pelabuhan menjadikan masyarakat Tanjung Priok banyak yang menjadi pekerja atau buruh pelabuhan dan pekerja pelaut. Sedangkan pekerja nelayan sudah sangat minim disana diakibatkan pantainya yang telah diubah menjadi pelabuhan. Membludaknya jumlah penduduk dan tidak diimbangnya dengan lapangan pekerjaan yang ada juga membuat masyarakat Tanjung Priok mayoritas mempunyai karakteristik dan watak yang keras karena dampak dari tekanan dan pertahanan hidup yang keras. Namun meski begitu, sistem gotong royong pada masyarakat Tanjung Priok masih bertahan dan melekat hingga saat ini sebab adanya kebutuhan saling berketergantungan satu sama lain dan perasaan atas nasib yang sama. Letak wilayahnya yang padat juga menjadi salah satu faktor intensitas interaksi antar masyarakat cukup sering dan menjadikan masyarakat Tanjung Priok memiliki hubungan paguyuban yang erat, meski latar belakang suku disana cukup heterogen. Dari segi politik, masyarakat Tanjung Priok masih cenderung menghormati dan mengikuti orang-orang yang berpengaruh di daerahnya. Hal ini terjadi karena rasa solidaritasnya yang tinggi dan perasaan atas nasib yang sama. Tidak hanya itu, Priok juga terkenal dengan masyarakatnya yang melekat isu politik. Sebab di daerah

kelurahan Kebon Bawang juga terdapat anggota DPR terpilih dari partai Nasdem yakni Sahroni, dan kelurahan Kebon Bawang seringkali diajak pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam kampanye-kampanye politik maupun aktivitas politik lainnya karena letak wilayahnya yang dekat dengan kantor Walikota Jakarta Utara.

Masyarakat Tanjung Priok memproduksi ruang kotanya untuk mempertahankan hidupnya di tengah kondisi kota yang megapolitan dan berkembang pesat secara modern. Masyarakat pinggiran kota ini memiliki banyak keterbatasan untuk bisa bersaing dalam persaingan ekonomi secara makro. Jadi yang dilakukannya adalah memproduksi ruang kotanya agar tetap sesuai dengan kepemilikan sosial, budaya, politik, maupun ekonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya agar hidupnya dapat bertahan dan tidak tergerus oleh kapitalisme. Melalui populasi jumlah penduduk yang padat, seringkali terjadi proses sirkulasi ekonomi di dalam ruang yang mengakibatkan proses perjuangan kelas dan konflik. Hal ini yang akan dikaji dalam penelitian skripsi saya, yakni “Produksi Ruang Kota di Masyarakat Pinggiran” yang berlokasi di Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok, tepatnya di RT 13 RW 05.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan penelitian bahwa terjadi proses produksi ruang kota yang dilakukan oleh masyarakat pinggiran kota Jakarta Utara, tepatnya di RT 13 RW 05 Kelurahan Kebon

Bawang Kecamatan Tanjung Priok untuk mempertahankan akumulasi modal sosial ekonominya untuk mempertahankan hidupnya ditengah perkembangan kota yang semakin megapolitan. Dengan ini penulis akan merumuskan permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran masyarakat RT 13 Kebon Bawang dalam konstelasi ruang sosial ekonomi dan politik Jakarta Utara?
2. Bagaimana bentuk produksi ruang sosial masyarakat RT 13 guna menjaga kebertahanan di tengah konstelasi ruang ekonomi sosial dan politik Jakarta Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tentunya didalam sebuah penelitian memiliki tujuan yang harus dicapai untuk memberikan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan permasalahan penelitian diatas diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan gambaran masyarakat RT 13 Kebon Bawang dalam konstelasi ruang sosial ekonomi dan politik Jakarta Utara.
2. Untuk menganalisis bentuk produksi ruang sosial masyarakat RT 13 guna menjaga kebertahanan di tengah konstelasi ruang ekonomi sosial dan politik Jakarta Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak.

Adapun dalam manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, antara lain:

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi pustaka untuk peneliti-peneliti mendatang yang juga mengkaji persoalan produksi ruang kota masyarakat pinggiran.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis mahasiswa, dosen, serta para pembaca lainnya yang juga berkonsentrasi dalam isu perkotaan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam mengatur aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya pada ruang kota masyarakat kelurahan Kebon Bawang kecamatan Tanjung Priok menjadi lebih tertata dan lebih baik lagi, sehingga tidak menimbulkan persaingan akumulasi modal yang bersifat negatif dan menyebabkan kesenjangan sosial yang signifikan didalam masyarakat Tanjung Priok, serta pertumbuhan masyarakatnya merata dan permasalahan-permasalahan sosial yang ada dapat diminimalisir.

Sedangkan manfaat praktis untuk masyarakat pinggiran adalah perlu ada ruang sosial yang lebih optimal, lebih terbuka, saling menghargai, dan tingkat kohesivitasnya kuat, sehingga ruang sosial yang telah diproduksi oleh masyarakat pinggiran dapat bertahan ditengah pesatnya perkembangan kapitalisme global.

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Beberapa penelitian mengenai produksi ruang kota sudah banyak diteliti sebelumnya oleh para peneliti lain. Namun biasanya fokus penelitian terletak pada konsep produksi ruang kota itu sendiri dibandingkan dengan studi kasus ruang kota. Terlebih penelitian mengenai produksi ruang kota pada masyarakat kelurahan Kebon Bawang kecamatan Tanjung Priok belum pernah ada sebelumnya. Hal ini menjadi tujuan adanya tinjauan penelitian sejenis untuk melihat kekurangan dari penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan penelitian studi produksi ruang kota masyarakat kelurahan Kebon Bawang Tanjung Priok ini dapat menutupi kekurangan dan memberikan perspektif lain pada peneliti-peneliti sebelumnya yang juga mengangkat penelitian sejenis. Tinjauan penelitian yang digunakan antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Peter J Taylor dengan judul *Space and sustainability: an exploratory essay on the production of social spaces through*

city-work.¹⁰ Jurnal ini menjelaskan tentang produksi ruang sosial yang dibuat melalui kerja kota di mana fokus pembahasannya mengenai ruang dan keberlanjutan. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk menempatkan pembuatan ruang sosial sebagai yang paling menonjol untuk memahami pendekatan keberlanjutan. Ruang tempat yang dibahas oleh Castells dan ruang arus sebagai teori sosial baru ditafsirkan secara umum. Sindrom moral Jacobs, diperkenalkan untuk mendukung dua produksi bentuk spasial ini: agen komersial melalui praktik jaringan mereka membuat ruang aliran dan agen wali melalui praktik mereka membuat teritorial ruang tempat. Kedua ruang dianggap sebagai hasilnya pekerjaan kota. Diidentifikasi pembagian kerja baru dibuat empat jenis pekerjaan kota utama, antara lain kerja-hinter, kerja-bersih, kerja-teritorial dan kerja-hierarki. Ide-ide ini dianggap sebagai alat untuk berpikir tentang mengembangkan kebijakan spasial untuk keberlanjutan.

Peneliti menggunakan teori Castells tentang konstruksi ruang sosial, di mana Castells berpendapat bahwa dalam masyarakat jaringan yang muncul, 'logika spasial baru', 'ruang arus', menggantikan logika yang pertama, yakni 'ruang tempat'. Kedua bentuk spasial diciptakan melalui praktik material. Dalam teori sosialnya, ruang adalah dukungan praktik material berbagi waktu. Artinya, ruang sosial yang diciptakan untuk menyatukan praktik membutuhkan perhatian simultan. Secara tradisional ini telah dicapai melalui kedekatan dalam ruang tempat (mis. tempat pasar),

¹⁰ Peter J Taylor, 2007, *Space and sustainability: an exploratory essay on the production of social spaces through city-work*, (Loughborough: *The Geographical Journal*), Vol. 173 No. 3 hlm 197-206.

tetapi ini tidak lagi diperlukan di 'usia informasi' di mana simultanitas dapat direalisasikan secara virtual dalam ruang mengalir (mis. pasar keuangan global). Alurnya adalah interaksi antara agen yang terpisah secara fisik yang pekerjaan sehari-harinya membutuhkan simultanitas yang jauh. Ruang inilah yang mendominasi struktur sosial di jaringan masyarakat. Peneliti menggunakan ruang arus Castells sebagai konsep yang lebih umum untuk menggambarkan materi dan aliran simbolik, terkait secara fungsional dan diperlukan untuk reproduksi sosial, tetapi tidak harus bersamaan.

Pada kesimpulannya, erosi jangka panjang dari prioritas sosial wali di zaman modern telah mencapai puncak globalisasi kontemporer. Wacana yang berpengaruh ini memulai masa depan negara bagian melalui pengurangan kedua negara, atau bahkan eliminasi lembaga primer wali modern negara-bangsa. Argumen Castells untuk ruang mengalirnya, menggantikan atau mendominasi ruang tempat, adalah terjemahan khusus argumen ini. Ke tingkat bahwa dia benar (yang belum tahu kita lakukan), ada berita buruk dan kabar baik untuk keberlanjutan. Berita buruknya adalah kecenderungan untuk lebih mengalir, kabar baiknya adalah kota-kota besar yang dihasilkan menjadi lebih mandiri dan lebih besar. Tapi apa yang tampaknya kasusnya adalah bahwa globalisasi mungkin sedang digembar-gemborkan modus vivendi post-modern baru antara wali dan praktik komersial. Misalnya pemisahan pekerjaan mungkin merupakan ancaman utama untuk penanganan keberlanjutan. Setiap strategi

yang layak harus melibatkan hubungan yang rumit antara kedua wali dan kepentingan komersial.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat penulis adalah keduanya sama-sama membahas tentang produksi ruang yang terbangun atas konstruksi sosial. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya di mana penelitian ini berfokus membahas mengenai ruang dan keberlanjutan serta ruang pada pembagian kerja. Sedangkan penelitian yang diambil penulis berfokus pada upaya masyarakat memproduksi dan mempertahankan ruangnya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Asep Suryana dengan judul *Ruang Kewargaan dan Ironi Keberdayaan Masyarakat Pesisir Jakarta*.¹¹ Penelitian ini menjelaskan tentang fenomena ironi keberdayaan yang dihadapi masyarakat pesisir Jakarta. Argumen yang dikembangkan bertumpu pada pendekatan kontestasi majemuk yang berpadu padan dengan konsep ruang kewargaan (*civic space*). Komunitas pesisir Jakarta relatif berdaya lantaran bertumpu pada ruang kewargaan yang tengah mereka bangun di tataran mikro. Mereka berperan lebih strategis: sebagai subjek aktif dan kreatif, bahkan mampu memanfaatkan berbagai peluang yang dihasilkan oleh kebijakan negara maupun aktivitas perusahaan-perusahaan besar. Ruang kewargaan yang mereka bangun pun begitu bermakna dalam konteks kontestasi mikro itu. Akan tetapi di tataran makro, posisi mereka amatlah ringkih. Mereka hanya berperan

¹¹ Asep Suryana, 2011, *Ruang Kewargaan dan Ironi Keberdayaan Masyarakat Pesisir Jakarta*, (Jakarta: Jurnal Sosialita), Vol. 9 No. 1 hlm 1-13.

sekunder bahkan tersier. Justru pasar dan negara—atau meminjam terminologi Perkins [2004] dan Rais [2008] fenomena korporatokrasi pesisir—yang berperan strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan banyak kasus (lihat Miles dan Huberman, 1992; dan Cresswell, 1998).

Kesimpulan pada penelitian ini adalah Laut, ikan, dan TPI memang telah membuat orang Bugis berdaya, dan diatas fondasi itulah mereka membangun ruang kewargaan yang spesifik. Akan tetapi, gejala korporatokrasi pesisir Jakarta justru adalah pelaku utama kontestasi makro. Tercemarnya pantai Laut Jawa misalnya, adalah produk korporatokratisme tersebut. Maka, rekonstruksi identitas pun harus dilihat sebagai konsekuensi sekaligus kapasitas adaptif orang Bugis ketika fondasi ruang kewargaan lama bergeser. Rekonstruksi identitas juga dapat dilihat sebagai produk yang dibangun dengan ruang kewargaan baru yang tengah mereka rintis. Mereka berdaya di jenjang mikro sekaligus ringkih di tingkat makro. Inilah ironi keberdayaan orang Bugis pesisir Jakarta. Begitu pula dengan rob. Musibah itu telah memperkuat ikatan horisontal-ketetangaan maupun ikatan vertikal antar para korban. Akan tetapi mereka pun dihadapkan pada fenomena ironi keberdayaan. Mereka berdaya hanya di tingkat mikro dan ringkih di jenjang makro. Gejala negara yang tidak berdaya, abai, bahkan korporatokrasi menjadi penyebab ironi keberdayaan. Padahal justru praktik kontestasi makro itulah yang dapat dilihat sebagai solusi masalah rob. Hal yang sama juga terjadi pada kasus Mbah Priok. Makam telah berfungsi sebagai arena penyegaran rohani keagamaan sekaligus kapital psikologis

responsif dalam rangka menghadapi kehidupan sehari-hari Tanjung Priok yang kian keras. Lagi-lagi mereka hanya berdaya di jenjang mikro; justru ringkih di tingkat makro. Inilah ironi keberdayaan masyarakat pesisir metropolitan ketika berhadapan dengan intervensi negara dan perusahaan. Ruang (*space*) pun mereka peroleh setelah dilakukan perjuangan fisik-berdarah dan itu pun harus disubordinasikan demi Bergeraknya denyut ekonomi makro. Di sinilah arti pentingnya fenomena keberdayaan komunitas pesisir dihampiri dengan pendekatan kontestasi majemuk. Ironi keberdayaan pun dapat ditempatkan secara proporsional, karena dua alasan berikut. Pertama, secara historis dan sosiologis, pesisir Jakarta telah menjadi arena kontestasi yang sangat dinamik dan mendalam. Ironisnya, penduduk pesisir sendiri jarang diwacanakan sebagai subjek strategis—berbanding terbalik dengan fakta historis dan sosiologis wilayah ini. Mereka dilihat sebagai pelaku yang tidak berdaya, dan karena itu selalu dianggap hanya beban sistem sosial ekonomi Jakarta. Kontribusinya pun dikategorikan amat minimal. Maka bila potensi keberdayaan mereka ditumbuhkan, hal tersebut dapat menepisakan anggapan yang salah kaprah tadi. Kedua, studi tentang masyarakat pesisir metropolitan sebagai area kajian menjadi amat strategis. Selama ini, peneliti sosial perkotaan memahami pesisir Jakarta selalu ditempatkan hanya sebagai bagian kecil dari perkembangan Jakarta. Bila pesisir metropolitan menjadi lokus kajian, hal tersebut memungkinkan kita memahami secara lebih baik tentang dinamika masyarakat pesisir metropolitan seperti Jakarta ini. Bahkan ia pun penting

secara praktis: agar keberdayaan komunitas pesisir Jakarta menjadi maksimal dan fungsional.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat penulis adalah keduanya sama-sama membahas kerentanan masyarakat pinggiran ditengah kota metropolitan namun cenderung lebih kuat dalam konteks mikro wilayahnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat dari penulis adalah, penelitian ini menganalisis dan melihat dari banyak kasus, sedangkan penulis hanya melihat dari satu studi kasus yakni masyarakat RT 13 RW 05 Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah dengan judul *Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya* pada Jurnal Sosiologi: MASYARAKAT.¹² Penelitian ini menjelaskan dua hal, yaitu permasalahan praktik penataan ruang di perkotaan, khususnya di Surabaya, yang telah menimbulkan kontestasi dan konflik dengan melibatkan aktor pemerintah, masyarakat, dan kekuatan kapitalis atau investor. Lalu yang kedua, kerangka penataan ruang yang menggunakan Perda RTRW No. 3 Tahun 2007 telah menimbulkan dampak yang berujung pada penguatan dan keberpihakan pemerintah kota kepada pihak kapitalis atau investor. Kedua hal tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosio-spasial. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis

¹² Siti Aminah, 2015, *Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya*, (Surabaya: Jurnal Sosiologi MASYARAKAT), Vol. 20 No. 1 hlm 59-79.

deskriptif. Problematika praktik tata ruang yang ada di Surabaya merupakan indikasi dari transformasi dalam proses penataan ruang di mana ruang bukan hanya diproduksi dan direproduksi untuk kepentingan kelas kapitalis, melainkan juga ruang direstrukturisasi dengan cara mengubah fungsi ruang dan diperuntukkan untuk publik. Hal ini relevan dengan perkembangan kajian penataan ruang mutakhir yang menunjukkan bahwa praktik penataan ruang di perkotaan merupakan refleksi dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, ruang diproduksi dalam modus produksi kapitalis dan ekspresi ruang kota merupakan dialektika antara produksi, konsumsi, dan administrasi (perencanaan dan implementasi kebijakan).

Kesimpulan pada penelitian ini adalah, praktik penataan yang ada di Kota Surabaya memperlihatkan dinamika ekonomi-politik. Aktor yang mewakili pemerintah, investor, dan masyarakat memberi andil pada inkonsistensi implementasi RTRW. Pemkot Surabaya merupakan representasi dari sistem kapitalis mengatur dan merasionalisasi ruang untuk produksi dan reproduksi ruang sosial ekonomi. Kondisi itu menguatkan tesis Lefebvre bahwa dalam suatu ruang terdapat aspek politik. Ruang di Kota Surabaya sebagai produk politik dan instrumen yang memungkinkan Kota Surabaya dapat berkembang. Dari sini kemudian muncul ruang dominan yang sebagiannya dimiliki oleh kelas dominan (pengembang/investor/kapitalis) dan sebagian lainnya dimiliki oleh masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diambil penulis adalah keduanya sama-sama membahas terkait produksi dan reproduksi ruang melalui aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya di mana fokus utamanya adalah pembahasan mengenai kontestasi ekonomi antar masyarakat. Perbedaannya terletak pada lingkup lokasi penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan di daerah Surabaya, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Jakarta, tepatnya kelurahan Kebon Bawang kecamatan Tanjung Priok.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hafid Setiadi DKK dengan judul *Produksi Ruang Kekuasaan di Pulau Jawa Abad ke-16 - 17 dan Dampaknya pada Pertumbuhan Kota* pada jurnal Majalah Geografi Indonesia.¹³ Penelitian ini menjelaskan tentang keterkaitan antara tradisi kekuasaan, produksi ruang, dan pertumbuhan kota di pulau Jawa pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-17 ketika Kesultanan Mataram memegang dominasi kekuasaan berlandaskan tradisi sawah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami pola dan proses spasial produksi ruang kekuasaan dan implikasinya pada pertumbuhan kota. Penulis menggunakan teori aliran baru yakni neo-marxian yang memandang manusia sebagai makhluk budaya yang berpikir.¹⁴ Melalui aliran neo-marxian ini diangkat tema utama produksi ruang dari pemikiran Henry Lefebvre. Menurut Lefebvre dalam tulisan jurnal ini, produksi ruang sangat terkait dengan berbagai praktek yang dilakukan oleh manusia

¹³ Hafid Setiadi DKK, 2017, *Produksi Ruang Kekuasaan di Pulau Jawa Abad ke-16-17 dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Kota*, (Yogyakarta: Majalah Geografi Indonesia), Vol. 31 No. 2 hlm 8-21.

serta bagaimana praktek-praktek tersebut berinteraksi dengan unsur-unsur ruang baik yang dapat dideteksi oleh indera maupun yang terkonsepsi dalam pikiran manusia. Produksi ruang juga terkait dengan subjektivitas dan persaingan kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merujuk pada pemikiran geografi interpretatif, yang dimaksudkan dengan mencari dan menemukan makna dari suatu fenomena tertentu.

Hasil dari pembahasan jurnal ini, pada sub-bab pertama, kesultanan Mataram menggunakan tradisi sawah sebagai basis geopolitik Pulau Jawa Abad XVI – XVII di mana desa-desa ditempatkan sebagai sumber pembiayaan pemerintah melalui sistem lungguh, yaitu membagi desa-desa diantara para penguasa dan mengendalikan tingkat produksi padi serta mengatur jumlah uang yang akan disetor ke kas kerajaan. Sebagai sumber kekayaan kerajaan, para petani dan keluarganya dipandang sebagai “makanan negara”. Mereka tersebar di desa-desa dan ditempatkan pada hirarki terbawah. Jumlah mereka dijadikan sebagai dasar untuk memperhitungkan besaran pajak yang akan disetorkan oleh setiap desa ke kas kerajaan. Melalui sistem lungguh, Kesultanan Mataram telah mengembalikan modal kekuasaan di Pulau Jawa pada penguasaan tanah dan penduduk.

Dalam sub-bab kedua, yaitu konsep ruang tradisi sawah, masyarakat mengenal konsep mancapat. Bagi masyarakat sawah di Pulau Jawa, konsep mancapat merupakan wujud pemberlakuan hukum dan tatanan alam semesta pada kehidupan manusia. Jadi,

tatanan yang berlaku pada kehidupan manusia merupakan replika dari tatanan alam semesta. Lalu, pada sub-bab terakhir dari pembahasan, pertumbuhan kota sebagai implikasi teritorialisasi dalam produksi ruang kekuasaan, produksi ruang kekuasaan oleh Kesultanan Mataram selama abad ke-16 hingga ke-17 menimbulkan teritorialisasi hingga ke seluruh pulau, kecuali ujung barat Pulau Jawa. Produksi ruang kekuasaan tersebut ditandai oleh penaklukan dan penguasaan beberapa kota penting di Pulau Jawa. Pada kesimpulannya, selama rentang waktu abad ke-16 hingga abad ke-17 pola dan proses spasial produksi ruang ditujukan untuk menjamin terbentuknya absolutisme kekuasaan raja sesuai dengan konsep ruang tradisi sawah yang telah diperkaya oleh unsur-unsur India dan Islam. Produksi ruang kekuasaan dilakukan melalui netralisasi dan pembentukan wilayah pinggiran. Modus produksi ini menyebabkan terjadinya likuidasi politik terhadap kota-kota tertentu yang ditandai oleh perubahan identitas kota. Selain itu, di wilayah pesisir perubahan identitas tersebut menyebabkan beberapa kota pesisir kehilangan peran pentingnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah keduanya sama-sama membahas produksi ruang kota pada masyarakat pinggiran, dalam penelitian ini maksudnya adalah pesisir. perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat penulis adalah, penelitian ini mengangkat studi kasus sejarah terdahulu sedangkan penulis mengangkat studi kasus kota di jaman sekarang.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Agustina M. Purnomo dengan judul *The Space of Potential Conflict and Urban Spatial Justice: The Case of Johar Baru Subdistrict, Central Jakarta*.¹⁵ Penelitian ini menjelaskan tentang Perkembangan ekonomi perkotaan yang berfokus pada pertumbuhan dan privatisasi yang ditandai oleh pertumbuhan kantor, perdagangan dan layanan di pusat kota menyisakan ruang bagi orang miskin dalam ruang pengembangan ekonomi perkotaan. Ruang kemiskinan diproduksi oleh mekanisme kapitalis dan direproduksi oleh kegiatan kelompok-kelompok masyarakat dalam ruang kemiskinan. Kenyataan bahwa Kecamatan Johar Baru sebagai kecamatan dengan Indeks Kerentanan Sosial Potensial dan Indeks Sensitivitas Konflik terletak di pusat pertumbuhan ekonomi Jakarta telah menunjukkan fenomena ini. Melalui metode kualitatif dengan wawancara, teknik pengumpulan data, observasi, studi dokumen dan tata ruang keterwakilan dalam perencanaan pembangunan kota, ditemukan bahwa kerusuhan adalah praktik representasional dari dominasi praktik spasial dan representasi praktik di tingkat makro. Kerusuhan sebagai bentuk kegiatan juga membangun ruang rawan konflik karena memperkuat posisinya sebagai ruang yang dirancang oleh produksi ruang kota sebagai ruang kemiskinan. Penelitian ini menggunakan teori dari Lefebvre tentang ruang representasional yang dibentuk oleh pengalaman orang yang malah menjadi kekuatan revolusioner dan penguat representasi spasial karena hegemoni.

¹⁵ Agustina M Purnomo, 2017, *The Space of Potential Conflict and Urban Spatial Justice: The Case of Johar Baru Subdistrict, Central Jakarta*, (Depok: Atlantis Press), Vol. 163 No. 1 hlm 173-178.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah Johar Baru sebagai konflik ruang rawan akan terus diproduksi saat pembangunan perkotaan meninggalkan ruang kemiskinan sebagai akibat dari sedimen dari pengembangan berorientasi pasar. Pembentukan ruang orang miskin adalah praktik spasial yang dominan, suatu proses digunakan oleh elit sosial dalam mencapai dan mempertahankan dominasi melalui praktik sosial. Representasi spasial tidak hanya mendominasi praktik spasial, tetapi juga representasional praktik. Johar Baru, yang berkembang menjadi ruang rawan konflik, memperkuat apa yang dikatakan Lefebvre tentang ruang representasional yang dibentuk oleh pengalaman orang yang malah menjadi kekuatan revolusioner malah menjadi penguat representasi spasial karena hegemoni. Praktek tata ruang oleh petarung gank hanya hegemoni kekuatan ekonomi diterapkan melalui perkotaan pengembangan. Bentuk-bentuk penggusuran dan relokasi itu sering digunakan sebagai solusi adalah bentuk praktik spasial yang semakin menguat menekan kaum miskin kota dan menggantinya dengan kaum urban kelas pekerja dengan ruang representasional yang lebih cocok ke mode produksi pembangunan perkotaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diambil penulis adalah keduanya sama-sama membahas tentang produksi ruang kota pada masyarakat miskin akibat banyaknya privatisasi lahan oleh kaum kapitalisme. Perbedaannya, terletak pada studi wilayah penelitian di mana penelitian ini dilakukan di Johar Baru Jakarta Pusat sedangkan penelitian penulis dilakukan di Tanjung Priok Jakarta Utara, lebih tepatnya di RW 5 Kecamatan Kebon Bawang.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Carlo Salone Dkk dengan judul *Cultural Production in Peripheral Urban Spaces: Lessons from Barriera, Turin (Italy)*.¹⁶ Penelitian ini menjelaskan tentang proses kolektif pembuatan tempat potensial yang bisa dilakukan dilaksanakan oleh produsen budaya, menganalisis perilaku sejumlah budaya organisasi yang bekerja di lingkungan pinggiran kota Turin (Italia), terpengaruh oleh transformasi sosial dan ekonomi yang mendalam dalam dua dekade terakhir. Mulai dari perspektif kritis pada interkoneksi antar praktik budaya dan regenerasi kota, dan mengembangkan konsep pembuatan tempat, penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yakni untuk menyelidiki sifat tertanam dari praktik-praktik ini dan mengeksplorasi cara pengorganisasian diri aktor budaya dan hubungan mereka dengan kebijakan publik. Studi kasus yang dibahas dalam penelitian ini menyangkut 'Barriera di Milano', daerah pinggiran yang luas di Turin (Italia), sebelumnya merupakan salah satu yang paling luas zona industri kota. Selama beberapa tahun terakhir, dan khususnya setelah pecahnya gelembung real estat 2007-2008, di Barriera berkonsentrasi penuh pada inisiatif budaya berlangsung, mendefinisikan kembali ruang kota dan sosial. Inisiatif ini tampaknya inovatif karena berbagai alasan: pertama, sementara mendemonstrasikan suatu keanehan yang aneh namun signifikan dalam lingkungan, mereka sebagian besar dihasilkan sendiri. Kedua, aset institusional, swasembada ekonomi dan rendahnya tingkat koneksi membawa inisiatif mendukung

¹⁶ Carlo Salone DKK, 2017, *Cultural production in peripheral urban spaces: lessons from Barriera, Turin (Italy)*, (Torino: *European Planning Studies*), Vol. 25 No. 12 hlm. 2117-2137.

bentuk baru kewarganegaraan dan pembuatan tempat berdasarkan 'tidak-untuk-laba kewiraswastaan'.

Penelitian ini disusun dengan bagian kedua memperkenalkan debat tentang peran yang dimainkan oleh budaya dalam proses regenerasi kota, menggarisbawahi batas intervensi fisik skala besar dan eksploitasi seni dan budaya dalam transformasi perkotaan, mulai dari kebijakan regenerasi keluarga tertentu berdasarkan integrasi sosial. Bagian ketiga mengembangkan konsep pembuatan tempat dan keterikatan, mengistimewakan pendekatan yang berfokus pada praktik. Bagian keempat memperkenalkan studi kasus ini, pertama, menggambarkan pendekatan keseluruhan untuk masalah regenerasi perkotaan yang dialami di Turin dan kedua, berfokus pada praktik budaya di 'Barriera di Milano'. Analisisnya mengungkapkan sifat aneh tetapi signifikan dari tertanamnya praktik budaya dan kemandirian relatif mereka dari kebijakan dan dukungan publik. Bagian terakhir merangkum temuan utama dan mengungkapkan pendekatan kewirausahaan baru dari aktor budaya dan peran mereka dalam proses pembuatan tempat.

Penelitian ini menggunakan pendapat dari Friedmann (2010), di mana kekuatan tempat sedang berlangsung dalam kemampuannya untuk memungkinkan praktik sosial yang kreatif dan memberikan makna baru pada semi-ditinggalkan ruang dan komunitas 'marginal'. Ini mensyaratkan bahwa tempat harus dipikirkan dan ditafsirkan dengan cara yang tidak esensial dan bahwa proses pembuatan tempat

banyak itu lebih kaya daripada satu set modifikasi fisik sederhana di ruang perkotaan, karena itu memungkinkan para aktor lokal untuk menerapkan praktik-praktik bermakna yang membentuk persepsi dan interpretasi dari ranah perkotaan, juga mengkatalisasi pengalaman mikro-ekonomi dan sosiokultural.

Pada kesimpulannya, bukti empiris dari peneliti tentang Barriera menunjukkan bahwa proses deindustrialisasi dan sisa-sisa yang kosong dapat menawarkan 'porositas' untuk produksi budaya independen untuk merevitalisasi ruang kota. Untuk memahami sifat dan karakteristik proses pembuatan tempat seperti itu, pertama-tama peneliti menganalisis modalitas tertanam dan kualitas hubungan yang disampaikan oleh praktik budaya di lingkungan tersebut. Pengawasan ini menunjukkan kekuatan kapasitas lingkungan untuk menarik inisiatif budaya yang dimotivasi oleh karakteristik tipologis dan harga bangunan serta kehadiran beberapa aktor budaya yang memiliki rasa dan memiliki kesamaan: semacam konsep 'suasana budaya' dan 'suasana industri' yang mudah ingat dan disebutkan oleh Grabher (1993). Meskipun hubungan sebenarnya yang diaktifkan diantara para aktor tidak selalu signifikan, secara geografis kedekatan tampaknya memiliki peran penentu dalam menjelaskan pilihan pelokalan. Pada saat yang sama, inisiatif semacam itu menghasilkan kasih sayang yang tumbuh di lingkungan dan penduduknya, yang menjadi semakin sadar dan terlibat dalam kegiatan terkait. Penduduk tetangga bukan hanya sebagai konsumen atau penerima budaya, tetapi menjadi bagian dari proses produksi. Dalam perspektif ini, hubungan dengan

penduduk berkontribusi untuk mengungkapkan proses pembuatan tempat tertanam yang diaktifkan melalui praktik budaya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat penulis adalah keduanya sama-sama membahas tentang masyarakatnya yang melakukan produksi ruang kota. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat penulis adalah, penelitian ini membahas tentang produksi berdasarkan basis budaya di wilayahnya sedangkan penulis membahas produksi berdasarkan basis sosial-budaya, ekonomi, dan politik.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Yoppie Christian & Desmiwati dengan judul *Menuju Urbanisasi Pulau Kecil: Produksi Ruang Abstrak dan Perampasan*.¹⁷ Jurnal ini menekankan pada persoalan konflik agraria di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta telah berlangsung lebih dari dua puluh tahun, di mana terdapat tiga pihak utama yang terlibat, yakni masyarakat lokal yang secara diametral berhadapan dengan korporasi wisata yang didukung pemerintah lokal. Tujuan dari kajian penelitian ini adalah untuk mendapatkan penjelasan secara teoretis mengenai relasi antara produksi ruang abstrak dan proses-proses perampasan ruang serta sumber agraria pulau kecil dengan upaya urbanisasi perdesaan demi kepentingan industri wisata.

¹⁷ Yoppie Christian dan Desmiwati, 2018, *Menuju Urbanisasi Pulau Kecil: Produksi Ruang Abstrak dan Perampasan*, (Bogor: *Journal of Regional and Rural Development Planning*), Vol. 2 No. 1 hlm. 45-63.

Penelitian ini menggunakan teori Lefebvre dalam membahas ruang pada produksi ruang abstrak dan perampasan. Metodologi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif induktif di mana peneliti mencoba merumuskan teori dan konsep berdasarkan fakta-fakta dan gejala empiris pada khusus konflik agraria di Pulau Pari. Alat analisis yang digunakan adalah pendekatan teori Produksi Ruang oleh Lefebvre dan konsep, *Accummulation by Dispossession* oleh David Harvey untuk mengerangkai data empiris yang ada, sehingga didapatkan arahan teori pada arah menengah (*meso-level theory*) yang menunjukkan hubungan, proses, dan struktur pada kehidupan sosial tingkat menengah serta hubungan antar peristiwa yang berlangsung dalam jangka waktu menengah (Neumann, 2015).

Kesimpulan pada penelitian ini adalah, dari kasus konflik ruang di Pulau Pari dapat terlihat bahwa ada sebuah garis linear yang menghubungkan antara produksi ruang abstrak, perampasan, dan urbanisasi. Pendekatan yang ekonomistik menjadikan sumber-sumber agraria sebagai komoditas ekonomi dan kekuasaan memastikan bahwa komponen-komponen ruang bisa dipisahkan agar ruang sosial dapat direduksi. Pelepasan komponen ruang membuka jalan bagi proses perampasan yang bertujuan untuk mengakumulasi sumber daya. Ruang kapital baru diciptakan untuk mengubah sumber agraria menjadi komoditas dan menciptakan tenaga kerja bebas tanpa tanah bagi industri wisata modern ke depan, cara yang digunakan adalah memanfaatkan kekuatan ekstra-ekonomi, hukum, politik, akumulasi pengetahuan serta uang. Perampasan memunculkan perlawanan namun kontestasi ini tidak seimbang sehingga

dalam konflik ruang di Pulau Pari ini sangat berpotensi memarginalkan masyarakat lokal. Kapitalisme cenderung akan ekspansif secara geografis agar menghasilkan efisiensi maksimal, masterplan pembangunan yang diterbitkan menciptakan *enclosure-enclosure* yang menempatkan masyarakat jauh dari akses, pembangunan hotel, sarana umum, jalan niscaya akan mengucilkan masyarakat dalam area kecil pemukiman yang harus berebut sumber daya lahan dan air yang terbatas, area-area konservasi masuk dalam area privat yang akan dikomodifikasi jasanya bagi swasta. Masyarakat lokal akan kehilangan segala hak konstitusinya atas ruang di pulau ini. Urbanisasi pulau kecil adalah lonceng kematian bagi ruang sosial masyarakat lokal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat penulis adalah keduanya sama-sama menjelaskan tentang proses produksi masyarakat pinggiran yang berusaha untuk mempertahankan ruang spasialnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat penulis adalah, penelitian ini secara jelas terjadi konflik perebutan lahan untuk dikomersialisasi sedangkan penelitian penulis membahas konflik produksi ruang yang secara spesifik pada ruang sosial ekonomi.

Untuk mengetahui lebih jelasnya persamaan dan perbedaan keenam tinjauan pustaka tersebut dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis, penulis akan menjabarkannya melalui tabel berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Telaah Pustaka

No.	Penulis, Judul, Tahun	Teori dan Metodologi	Temuan/ Hasil	Analisis	
				Persamaan	Perbedaan
1.	Peter J Taylor, <i>Space and sustainability: an exploratory essay on the production of social spaces through city-work</i> , 2007.	Konstruksi ruang sosial.	produksi ruang sosial yang dibuat melalui kerja kota. Dalam teori sosialnya, ruang adalah dukungan praktik material berbagi waktu. Artinya, ruang sosial yang diciptakan untuk menyatukan praktik membutuhkan perhatian simultan.	Sama-sama membahas tentang produksi ruang yang terbangun atas konstruksi sosial.	<ul style="list-style-type: none"> - Peter berfokus membahas mengenai ruang dan keberlanjutan serta ruang pada pembagian kerja. - Peneliti berfokus pada upaya masyarakat memproduksi dan mempertahankan ruangnya.
2.	Asep Suryana, <i>Ruang Kewargaan dan Ironi Keberdayaan Masyarakat Pesisir Jakarta</i> , 2011.	Konsep ruang kewargaan dan pendekatan kualitatif dengan banyak kasus.	Komunitas pesisir Jakarta relatif berdaya lantaran bertumpu pada ruang kewargaan yang tengah mereka bangun di tataran mikro. Akan tetapi di tataran makro, posisi mereka amatlah ringkih. Mereka hanya berperan sekunder bahkan tersier.	Sama-sama membahas kerentanan masyarakat pinggiran ditengah kota metropolitan namun cenderung lebih kuat dalam konteks mikro wilayahnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Asep menganalisis dan melihat dari banyak kasus. - Peneliti melihat dari satu studi kasus yakni masyarakat RT 13 RW 05 Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok.
3.	Siti Aminah, <i>Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya</i> , 2015.	Pendekatan sosio-spasial dan pendekatan kualitatif.	Praktik penataan yang ada di Kota Surabaya memperlihatkan dinamika ekonomi-politik. Aktor yang mewakili pemerintah, investor, dan masyarakat memberi andil pada inkonsistensi implementasi	Sama-sama membahas terkait produksi dan reproduksi ruang melalui aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya di mana fokus utamanya adalah pembahasan mengenai	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Siti dilakukan di daerah Surabaya. - Penelitian penulis dilakukan di Jakarta, tepatnya kelurahan Kebon Bawang kecamatan

			RTRW.	kontestasi ekonomi antar masyarakat.	Tanjung Priok.
4.	Hafid Setiadi DKK, Produksi Ruang Kekuasaan di Pulau Jawa Abad ke-16-17 dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Kota, 2017.	Teori aliran baru neo-marxian dan metode kualitatif interpretatif.	Produksi ruang sangat terkait dengan berbagai praktek yang dilakukan oleh manusia serta bagaimana praktek-praktek tersebut berinteraksi dengan unsur-unsur ruang baik yang dapat dideteksi oleh indera maupun yang terkonsepsi dalam pikiran manusia. Produksi ruang juga terkait dengan subjektivitas dan persaingan kekuasaan.	Sama-sama membahas produksi ruang kota pada masyarakat pinggiran, dalam penelitian ini maksudnya adalah pesisir.	<ul style="list-style-type: none"> - Hafid DKK mengangkat studi kasus sejarah terdahulu. - Penulis mengangkat studi kasus kota di jaman sekarang.
5.	Agustina M Purnomo, <i>The Space of Potential Conflict and Urban Spatial Justice: The Case of Johar Baru Subdistrict, Central Jakarta</i> , 2017.	Teori Lefebvre tentang ruang representasional dan metode kualitatif.	Johar Baru sebagai konflik ruang rawan akan terus diproduksi saat pembangunan perkotaan meninggalkan ruang kemiskinan sebagai akibat dari sedimen dari pengembangan berorientasi pasar.	Sama-sama membahas tentang produksi ruang kota pada masyarakat miskin akibat banyaknya privatisasi lahan oleh kaum kapitalisme	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Agustina dilakukan di Johar Baru Jakarta Pusat. - Penelitian penulis dilakukan di Tanjung Priok Jakarta Utara, lebih tepatnya di RW 5 Kecamatan Kebon Bawang.
6.	Carlo Salone DKK, <i>Cultural production in peripheral urban spaces: lessons from Barriera, Turin (Italy)</i> , 2017.	Perspektif kritis pada interkoneksi antar praktik budaya dan regenerasi kota.	Barriera menunjukkan bahwa proses deindustrialisasi dan sisa-sisa yang kosong dapat menawarkan 'porositas' untuk produksi budaya independen untuk merevitalisasi ruang kota.	Sama-sama membahas tentang masyarakatnya yang melakukan produksi ruang kota.	<ul style="list-style-type: none"> - Carlo membahas tentang produksi berdasarkan basis budaya di wilayahnya. - Penulis membahas produksi berdasarkan basis

					<p>sosial-budaya, ekonomi, dan politik.</p>
7.	<p>Yoppie Christian dan Desmiwati, Menuju Urbanisasi Pulau Kecil: Produksi Ruang Abstrak dan Perampasan, 2018.</p>	<p>Teori produksi ruang Lefebvre, konsep <i>Accumulation by Dispossession</i> David Harvey dan pendekatan kualitatif induktif.</p>	<p>Kasus konflik ruang di Pulau Pari dapat terlihat bahwa ada sebuah garis linear yang menghubungkan antara produksi ruang abstrak, perampasan, dan urbanisasi.</p>	<p>Sama-sama menjelaskan tentang proses produksi masyarakat pinggiran yang berusaha untuk mempertahankan ruang spasialnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Yoppie dan Desmiwati secara jelas terjadi konflik perebutan lahan untuk dikomersialisasi. - Penelitian penulis membahas konflik produksi ruang yang secara spesifik pada ruang sosial ekonomi.

Sumber: Diolah dari Tinjauan Penelitian, 2020

Pada akhirnya, berdasarkan beberapa tinjauan pustaka yang diambil, penulis dapat menggali informasi yang relevan dalam mendukung penelitian yang akan dilakukan terhadap pola produksi ruang di kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok. Ketujuh tinjauan penelitian tersebut kemudian dapat membantu penulis dalam merangkai pola pikir yang sistematis dalam rangka penyusunan skripsi yang akan dilakukan. Melalui tinjauan penelitian ini, penulis juga mendapat beberapa konsep produksi ruang dan memperoleh gambaran mengenai teknik-teknik dalam penulisan dan menganalisis data yang tepat serta dalam menuliskan ide-ide dan hasil penelitian yang relevan.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Kota dan Ketidakadilan Sosial dalam Pandangan David Harvey¹⁸

Harvey dalam pemikirannya tentang produksi ruang kota menjelaskan tentang kota dan kapitalisme yang menghasilkan ketidakadilan sosial, terutama bagi kaum urban kelas bawah. Harvey menawarkan bahwa sudah seharusnya kota dibangun bukan untuk menciptakan kesenjangan dan keterasingan masyarakat kelas bawah, melainkan perlu menciptakan kota sebagai ruang yang mampu menampung berbagai kepentingan kolektif dari siapapun. Harvey menawarkan transformasi urbanisasi yang seharusnya dicari alternatifnya bukan dengan menciptakan kehidupan subsisten lanjutan dan keterasingan, melainkan menciptakan ruang-ruang yang penuh dengan

¹⁸ David Harvey, 2012, *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*, (London: Verso).

negosiasi antar kelas secara terbuka. Tujuan dari Harvey ini adalah menawarkan cara atau metode untuk melawan ketidakadilan bagi kaum urban dengan semangat aktivisme dan penguatan kelompok-kelompok sosial.

Sebagai ruang heterogenitas dalam kota terdapat hubungan plural bersifat antagonis atau pertentangan. Salah satu antagonisme adalah karena terjadinya *extraction of value*, di mana hampir semua warga kota saling melakukan proses sirkulasi nilai dan nilai-nilai yang mereka hasilkan ini kemudian terserap kembali kedalam sirkulasi hutang dan konsumsi sehingga menyebabkan kaum urban tetap tinggal dalam kehidupan yang subsisten. Upah buruh dan karyawan misalnya, diambil kembali dalam bentuk mereka harus membayar sewa rumah dan kebutuhan kredit lainnya seperti motor. Pelanggan yang menggunakan telepon seluler, tiba-tiba mendapatkan potongan-potongan dalam jumlah kecil yang tak terasa dan tidak masuk akal. Demikian juga pemilik tanah hingga institusi keuangan dan kesehatan melakukan hal serupa. Hal itulah yang menjadikan kota merupakan tempat perjuangan kelas karena relasi-relasi sosial ekonomi didalamnya sesungguhnya saling bertentangan. Semua pekerja, buruh hingga sopir taksi memproduksi nilai atau *value*, sehingga yang dilakukan oleh kelas atas adalah bagaimana menyerap nilai produksi yang dimiliki oleh kelas bawah kembali ke kelas atas kaum borjuis. Kaum borjuis mengekstraksi nilai dengan cara mendapatkan nilai tambah dari gaji buruh yang ditekan. *Extraction of value* secara tidak langsung menyebabkan kaum urban kelas bawah terjebak dalam rantai keterpinggiran yang diciptakan oleh jeratan kapitalis.

Teori sentral dari David Harvey ialah *accumulation by dispossession* di mana kapitalis mendukung kebijakan neoliberalisme yang diterapkan di kota. Caranya adalah dengan melakukan sentralisasi kekayaan dan kekuasaan kapitalis tertentu dengan cara menswastanisasikan semua kebutuhan publik, seperti tanah hingga air. Kota dibangun berdasarkan '*accumulation by dispossession*' di mana privatisasi mentransfer aset-aset publik yang produktif dan dimiliki negara ke pengusaha-pengusaha swasta, salah satunya tanah dan air. Semua warga urban harus membayar kebutuhan publik yang seharusnya gratis. Kota menjadi perjuangan kelas karena semua hasil dari nilai lebih para pekerja kembali terserap untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan publik yang telah diswastakan, misalnya seperti air dan sewa tanah. Kota secara tidak langsung menjadi arena perjuangan kelas bawah.

Kapitalisme memerlukan urbanisasi untuk menyerap nilai lebih yang dibawa oleh para migran, buruh, dan karyawan. Hukum *coercive laws of competition* atau persaingan antar pemilik perusahaan di perkotaan menyerap setiap individu untuk menjadi kaum urban baru dengan nilai tenaga kerja yang murah demi menghasilkan produksi yang massif sehingga menghasilkan nilai lebih bagi para pengusaha dan bos perusahaan di wilayah perkotaan. Dengan kata lain, Harvey berargumen bahwa urbanisasi selalu muncul sebagai fenomena kelas, karena pertumbuhan kota pasti dihasilkan dari *surplus value* atau nilai lebih para pekerja yang menghidupkan ekonomi kota. Pertumbuhan kota sangat berkaitan dengan isu kelas mengingat distribusi kekayaan yang semakin terekstraksi pada kaum elit.

Solusi yang ditawarkan oleh Harvey atas hak pada produksi ruang kota antara lain kota sebagai ruang kolektivitas, ruang negosiasi, ruang keterbukaan, dan ruang untuk berserikat. Pada ruang kolektivitas, pemikiran Harvey dipengaruhi oleh pemikirannya Lefebvre yakni *right to demand*, di mana tiap warga kota mempunyai hak permintaan pada kebutuhan paling mendasar, seperti hak untuk tidak takut terhadap kondisi kota, hak untuk menikmati kota, hingga hak untuk menjadikan kota “bermakna” untuk warganya dan hak mendapatkan perumahan layak dan terjangkau. Perlawanan yang muncul dalam masyarakat kota tidak lagi dibatasi pada sekumpulan “kelas pekerja” semata yang bekerja secara eksklusif di pabrik, melainkan perlawanan telah terjadi pada beragam kelas pekerja yang terfragmentasi, terbagi, cair dan tidak terorganisir. Reaksi yang muncul adalah penciptaan wilayah yang bersifat *heterotopic*. Heterotopis ini bersifat spontanitas, muncul dari kolektivitas, dan merupakan reaksi politis keseharian. Reaksi kesadaran terhadap kondisi kota justru muncul secara kolektif dibanding individual. Kesadaran kolektif ini muncul dengan tujuan untuk menemukan definisi ulang terhadap sebuah kota yang semakin meng-alienasi warganya. Aksi kolektif heterotopis juga merupakan reaksi terhadap individualisme yang muncul akibat privatisasi di hampir semua ruang dan tanah di perkotaan.

Pada solusi atas ruang negosiasi, Harvey menawarkan konsep *commonality*, yakni melihat bahwa manusia pada dasarnya mempunyai nilai kepentingan yang disepakati dan dibangun bersama. *Commonality* masyarakat merupakan jalan alternatif dari privatisasi dan monetisasi. Masyarakat urban punya hak untuk mengalokasikan

kepentingan kolektif mereka dalam bentuk kegiatan pelesiran, koperasi bersama, asuransi, yayasan bersama, hingga bersuara dan berkumpul bersama. Hal ini juga yang menjadikan kota seharusnya adalah sebuah ruang kebersamaan, semuanya memiliki hak untuk menikmati kota secara bersama.

Lalu solusi terakhir yang ditawarkan oleh Harvey adalah kota sebagai ruang berserikat. Harvey terinspirasi dari studi Sian Lazar yang memotret kondisi dan relasi sosial masyarakat El Alto di Bolivia. El Alto merupakan kota yang relatif dibangun pada tahun 1988. Kota ini dibangun di sekitar pertambangan timah yang telah diswastanisasi. Daerah pertanian sekitarnya menjadi tergeser. Kota El Alto kemudian menyerap datangnya migran secara gradual dan hal ini menyebabkan harga tanah menjadi naik. Buruh tertekan karena harus membayar biaya sewa rumah yang mahal, ditambah para petani yang tergeser dari kawasan pinggiran El Alto. Revolusi kemudian berkejolak akibat kemiskinan yang akut, ditambah kenyataan bahwa hampir semua buruh di pertambangan timah adalah masyarakat *Native American*.

Reaksi dari masifnya kapitalisasi ruang dan sarana perkotaan, menyebabkan melebarnya aksi terhadap pengembangan ekonomi di kawasan ini. Ruang-ruang eksploitasi dan perlawanan selama ini yang hanya secara eksklusif dimiliki oleh kaum buruh di pabrik-pabrik melebar keluar, sehingga isu pertentangan bukan lagi antar kelas melainkan isu hak asasi, kedaulatan dan kewarganegaraan. Dalam hal ini warga tidak perlu menjadi ideologis dahulu ketika hak-hak paling mendasar dan paling

umum pada masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan tanah, air dan sanitasi, hak berkumpul dan bersuara serta terinjaknya identitas dan harga diri, tidak terpenuhi. Warga menjadi berani untuk bergerak ketika kebutuhan dasar mereka terampas. Tidak berarti kemudian warga kota menjadi anti-kapitalis, melainkan cara gerak kapitalisme yang melanggar hak dasar kewarganegaraan, hak asasi manusia dan hak kedaulatan inilah yang kemudian menjadi masalah besar. Namun demikian, tuntutan terhadap hak kewarganegaraan (*citizenship*) tidak pula seperti dalam pandangan barat yang cenderung individualistis, melainkan di El Alto tuntutan hak kewarganegaraan berlipat, baik itu individual, komunal, faksional yang melibatkan serikat buruh, masyarakat indigenous, hingga partai-partai politik populis, yang pada akhirnya mereka membuat banyak sekali serikat untuk sama-sama bersatu melawan kapitalisme.

1.6.2 Konsep Ruang Sosial

Ruang sosial yang dijelaskan oleh beberapa tokoh sosiologi dunia pada jurnalnya Alkhudri yang berjudul “Konseptualisasi Ruang Pendidikan”¹⁹ secara sosiologis diartikan sebagai dasar dari berbagai bentuk komunitas yang mengadakan interaksi. Dari interaksi-interaksi tersebut menyebabkan terjadinya relasi antara pengetahuan dan kuasa. Hal ini yang menjadi inti dari tesis Foucault mengenai ruang, pengetahuan, dan kuasa. *‘Knowledge is power’*, begitulah relasi kuasa pengetahuan

¹⁹ Ahmad Tarmiji Alkhudri, 2012, *Konseptualisasi Ruang Sosial Pendidikan*, (Jakarta: Jurnal Sosial MASYARAKAT), Vol. 17 No. 2 hlm. 207-216.

dalam pandangan Foucault. Kekuasaan dan pengetahuan selalu menyebar dalam setiap *real space* kehidupan manusia, baik sosial, politik, hukum, dan pendidikan. Wujud ruang sosial yang konkret juga dikaji oleh Lefebvre secara geografis. Pada titik ini dia berusaha mengkaji makna ruang secara fisik dalam kajian ilmu sosial. Tesisnya mengatakan bahwa ruang secara fisik memiliki pengaruh terhadap interaksi-interaksi yang ada. Hampir mirip dengan Foucault, namun Habermas memiliki konsepsi yang berbeda dalam melihat ruang. Menurutnya ruang secara spesifik dikonsepsikan sebagai ruang publik. Eksistensi ruang publik menurutnya haruslah bebas dari intervensi. Negara dalam konteks ini harus menyediakan dan menjaga ruang publik tersebut. Oleh karenanya, ruang publik dapat juga dimaknai sebagai ruang yang dimiliki atau diurus oleh negara untuk kepentingan publik. Di era pembangunan berorientasi pasar dan monopoli ekonomi yang mengambil *konsep public-private partnership* (sejak zaman Orde Baru, terutama sejak akhir tahun 1980-an mengikuti perubahan paradigma ekonomi dunia), makna ruang publik telah berubah menjadi ruang *public-private* atau ruang privat yang berorientasi publik atau ruang publik yang berorientasi privat. Neoliberalisme selalu butuh negara untuk menjamin keamanan privatisasi, sehingga muncullah *partnership public/private*.

1.6.3 Konsep Pinggiran

Blumenfeld dalam Angotti pada tesis Warsono²⁰ mengatakan bahwa, pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi telah memacu perkembangan wilayah kota ke pinggiran, kondisi ini didukung dengan meningkatnya wilayah yang memiliki ciri kekotaan. Adanya gejala sebagaimana tersebut di atas maka akan memperlihatkan ciri-ciri kekotaan pada daerah yang terletak di perbatasan kota, baik yang termasuk dalam wilayah kota maupun di luar wilayah kota, daerah semacam ini biasa disebut daerah pinggiran kota.

Ruswurm, 1980 dalam Yunus pada tesis Warsono²¹ mengatakan bahwa, faktor-faktor utama yang mempengaruhi perkembangan pinggiran kota yakni: 1) Pertumbuhan penduduk (*population growth*); 2) persaingan memperoleh lahan (*competition for land*); 3) hak-hak kepemilikan (*property right*); 4) kegiatan “*developers*” (*developers activities*); 5) perencanaan (*planning controls*); 6) perkembangan teknologi (*technological development*); dan 7) lingkungan fisik (*physical environment*).

Tingkat urbanisasi yang tinggi, membawa dampak bagi perkembangan daerah pinggiran kota, dan telah mengubah drastis wilayah permukiman desa-kota hal itu dikarenakan adanya kebutuhan penampungan bagi penduduk pendatang maupun

²⁰ Agus Warsono, 2006, *Perkembangan Pemukiman Pinggiran Kota pada koridor Jalan Kaliurang Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman*, (Semarang: Tesis pada Program Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang), hlm. 44.

²¹ Loc.cit.

penduduk lama yang ingin mencari “keleluasaan”. Kebutuhan akan perumahan bagi penduduk dan belum lagi penyediaan ruang terbatas bagi kawasan industri menjadikan perubahan pola penggunaan tanah yang signifikan, terutama wilayah permukiman.²²

Sebagaimana yang didefinisikan oleh Spencer pada tesis Warsono,²³ beberapa alasan yang mendorong perpindahan penduduk ke daerah pinggiran kota: 1) Penggunaan tanah untuk permukiman di kota bersaing dengan tanah lain yang lebih komersil, sehingga tanah yang tersedia untuk permukiman semakin berkurang; 2) Penduduk kota semakin meningkat jumlahnya; 3) Sarana transportasi menuju pinggiran kota menjadi lebih baik dan fleksibel, sehingga memungkinkan penduduk dan perusahaan-perusahaan pindah lebih jauh dari pusat-pusat bisnis (kota), menyebar ke pinggiran kota mengikuti jalur transportasi.

Evers, dalam tesis Warsono²⁴ mengemukakan bahwa, gejala perkembangan perluasan kota yang secara terencana maupun tidak direncanakan (natural), berimplikasi pada berubahnya konsep fungsi tanah sebagai gejala baru di pinggiran kota terutama bagi penduduk asli. Sebelum adanya proses perubahan guna lahan sebagai bentuk perluasan kota, nilai tanah dipandang dari segi fungsinya merupakan lahan pertanian. Dengan terjadinya perkembangan dan pemekaran kota ke pinggiran, maka konsep tanah berubah mempunyai nilai komersial sebagai “barang” yang dapat diperjualbelikan sebagaimana barang komoditas. Hal ini terdapat keterkaitan dengan

²² Ibid hal. 45.

²³ Loc.cit.

²⁴ Ibid hal. 46.

meningkatnya permintaan dan harga tanah di lokasi bersangkutan, terutama pada tanah yang memiliki letak strategis seperti di sekitar jalur transportasi.

Kecenderungan pertumbuhan kawasan permukiman di pinggiran kota dalam sistem metropolitan di Indonesia masih akan terus berlanjut di masa mendatang, antara lain karena kecenderungan pertumbuhan penduduk yang terus tinggi di metropolitan, terutama di metropolitan Jakarta/Jabodetabek. Hal ini mengakibatkan terjadinya kondisi degradasi lingkungan, krisis infrastruktur, kemacetan, risiko bencana dan ketidaksiapan aparat pemerintah sehingga proses perkembangan mengarah pada ketidakberlanjutan.²⁵

1.6.4 Masyarakat Pinggiran

Masyarakat pinggiran adalah²⁶ masyarakat yang hidup dalam keterbatasan akan kebutuhan pokok dan kemampuan akan pengembangan diri serta minimnya akses untuk keluar dari keterhimpitan kondisi. Oscar Lewis (1959) dalam jurnalnya Aswadi dan Ahmad Murtafik Haris mengindikasikan masyarakat pinggiran dengan kemiskinan yang bukan semata-mata kekurangan dalam ukuran ekonomi, tetapi juga melibatkan kekurangan dalam ukuran kebudayaan dan kejiwaan. Sementara itu di dalamnya terkandung proses sosialisasi corak kebudayaan dari generasi yang tua ke

²⁵ Janthy Trilusianthy Hidajat, 2013, *Dinamika Pertumbuhan dan Status Keberlanjutan Kawasan Permukiman di Pinggiran Kota Wilayah Metropolitan Jakarta*, (Bogor: Globe), Vol. 15 No. 1 hlm 93-100.

²⁶ Aswadi dan Ahmad Murtafik Haris, 2012, *Solidaritas Masyarakat Pinggiran*, (Surabaya: Jurnal Sosiologi Islam), Vol. 2 No. 2 hlm. 67-86.

generasi berikutnya atau yang disebut sebagai budaya kemiskinan. Pengertian di atas menjelaskan adanya beberapa komponen masyarakat pinggiran yaitu: keterbatasan ekonomi dan pengembangan diri dan hilangnya atau minimnya akses terhadap kebijakan untuk membela kepentingan mereka sehingga dibutuhkan keberpihakan dari pihak yang berwenang dalam hal ini negara yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 berkewajiban mensejahterakan rakyat untuk mengentaskan dan mengangkat mereka dari keterpurukan dan keterhimpitan ekonomi. Ibarat orang yang sedang terjerebab dalam rawa, maka harus ada orang yang menolongnya. Tanpanya maka ia akan sulit keluar dari rawa tersebut. Setelah dibantu untuk dikeluarkan barulah dia bisa menggerakkan diri untuk perbaikan dan pemenuhan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya ke depan.

1.6.5 Kesadaran Kelas Masyarakat Pinggiran

Kesadaran kelas dalam pandangannya Marx yang dikutip dari jurnal “Pemikiran-Pemikiran Karl Marx” adalah²⁷ satu kesadaran subyektif akan kepentingan kelas obyektif yang mereka miliki bersama orang-orang lain dalam posisi yang serupa dalam sistem produksi. Konsep kepentingan mengacu pada sumber-sumber materil yang aktual yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan individu. Pada contohnya, kepentingan kelas kapitalis terletak pada keuntungan yang semakin meningkat, sedangkan kepentingan kelas proletar secara sempit meliputi kenaikan

²⁷ M Chairul Basrun Umanailo, 2019, *Pemikiran-Pemikiran Karl Marx*, (Maluku: ResearchGate).

upah, sedangkan secara luas meliputi penguasaan terhadap proses produksi yang lebih luas. Kesadaran itu berakar pada praksis manusia, yang pada gilirannya bersifat sosial. Inilah pengertian dari yang dikatakan, bahwa bukan kesadaran yang menentukan eksistensi orang, tetapi sebaliknya, kehidupan sosial merekalah yang menentukan kesadaran mereka.

Kesadaran kelas yang diperoleh oleh kaum proletar pada akhirnya akan membentuk jaringan komunikasi untuk menjelaskan kepentingan bersama kaum proletar. Jaringan komunikasi ini pada akhirnya dapat membentuk suatu organisasi yang bisa berbentuk serikat-serikat buruh atau serikat-serikat kerja lainnya yang tujuan kepentingannya untuk mendesak upah yang lebih tinggi, perbaikan kondisi kerja dan sebagainya. Namun akhirnya, organisasi kelas buruh itu akan menjadi cukup kuat untuk menghancurkan seluruh struktur sosial kapitalis dan menggantinya dengan struktur sosial yang akan menghargai kebutuhan dan kepentingan umat manusia seluruhnya.

Kesadaran kelas masyarakat pinggiran diartikan sebagai bentuk kesadaran dan perasaan bersama dari masing-masing individu di masyarakat yang berada pada pinggiran kota dalam posisi yang serupa pada sistem produksinya. Kesadaran kelas yang dimiliki oleh masyarakat pinggiran ini akan membentuk jaringan komunikasi untuk menjelaskan kepentingan dan keresahan bersama yang pada akhirnya dapat membangun kelompok organisasi yang lebih besar dan berupaya untuk

menghancurkan seluruh struktur sosial kapitalis dan menggantikannya dengan struktur sosial yang sesuai dengan kondisi ruang sosial-budaya, ekonomi, dan politik masyarakat pinggirannya.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah konsep besar yang meliputi beberapa bentuk penyelidikan yang membantu dalam memahami dan menjelaskan makna fenomena sosial yang alami dengan tanpa dilakukan sebuah perlakuan. Menurut Creswell penelitian kualitatif adalah jenis penelitian di mana peneliti sangat tergantung terhadap informasi dari objek/partisipan pada: ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri atas kata-kata/teks dari partisipan, menjelaskan dan melakukan analisa terhadap kata-kata dan melakukan penelitian secara subyektif.²⁸

Strategi yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang menurut Creswell²⁹ merupakan strategi penelitian di mana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktifitas, dan peneliti

²⁸ J. W. Creswell, 2008, *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (Edisi ke-3)*, (Upper Saddle River: Pearson Education Inc), hlm. 46.

²⁹ J. W. Creswell, 2010, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar), hlm 20.

mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Penulis menggunakan metode pendekatan ini karena membutuhkan informasi yang mendalam serta akan mendeskripsikan bagaimana masyarakat Tanjung Priok memproduksi ruang kotanya untuk strategi bertahan hidup. Penulis juga berusaha untuk memahami permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya dengan konsep atau teori yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu penulis akan melihatnya melalui aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya. Lalu dalam subjek penelitiannya, penulis akan melakukan wawancara mendalam kepada masyarakat yang terlibat dalam penelitian penulis.

1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok. Secara lebih spesifik peneliti akan memusatkan penelitian di RW 05 dengan alasan bahwa tingkat kepadatannya ada di RW tersebut. RW ini terdiri dari 13 RT. Di RW 05, peneliti akan menggunakan RT 13 sebagai lokus sosial ekonomi dari penelitian ini. Penelitian ini akan menggambarkan lanskap produksi ruang kota di RW 05 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini pada pertengahan bulan Januari sampai dengan Juni akhir 2020.

1.7.3 Subyek Penelitian

Sebelum itu, subjek penelitian menurut Suharsimi Arikunto³⁰ memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal, atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang peneliti amati. Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Subjek penelitian merupakan kunci yang sangat penting didalam penelitian kualitatif. Sasaran subjek penelitian yang akan penulis tuju ialah masyarakat Tanjung Priok yang juga bertempat tinggal sekaligus mencari nafkah di daerahnya sendiri. Selain itu penulis juga akan mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di daerah yang akan penulis teliti, serta tokoh-tokoh formal. Penjabaran terkait informan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Karakteristik Informan

NO.	NAMA	KETERANGAN	KATEGORI
1.	Fitriyani	Warga Kelurahan Kebon Bawang RW 005 RT 13	Masyarakat

³⁰ Suharsimi Arikunto, 2016, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm 26.

2.	Ida Septiani	Warga kelurahan Kebon Bawang RW 005 RT 13	Masyarakat
3.	Suhaeli	Warga kelurahan Kebon Bawang RW 005 RT 13	Masyarakat
4.	Endra Zahiri	Warga Kelurahan Kebon Bawang RW 005 RT 13	Masyarakat
5.	Ellya Rosma	Warga Kelurahan Kebon Bawang RW 005 RT 13	Masyarakat
6.	Eddy Chandra	Warga Kelurahan Kebon Bawang RW 005 RT 13	Masyarakat
7.	Choirunnisa	Account Officer Koperasi MEKAAR	Tokoh Formal
8.	Willy Hardiana	Kepala Lurah Kelurahan Kebon Bawang	Tokoh Formal
9.	Nurhayati	Ketua Ibu-Ibu PKK	Tokoh Formal
10.	Sukaryadi	Ketua RT 013 Kelurahan Kebon Bawang	Tokoh Masyarakat
11.	Ramdon Ronny	Ketua RW 005 Kelurahan Kebon Bawang	Tokoh Masyarakat

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2020

1.7.4 Peran Peneliti

Peran peneliti disini sebagai orang yang meneliti dan melakukan pengamatan secara langsung terhadap realitas sosial yang ada di masyarakat. Peneliti berusaha mencari tahu bagaimana produksi ruang kota pada masyarakat pinggiran dapat terbentuk melalui aspek ekonomi, politik, dan sosial budayanya, serta bagaimana masyarakat bersaing dalam kebutuhan ekonominya untuk mendapatkan kehidupan yang semestinya. Selain itu peneliti juga turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang maksimal. Dengan demikian maka peneliti dapat mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti juga berperan sebagai instrument sekaligus pelaksana, perencana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pelapor penelitian.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpul data, diantaranya:

1. Kepustakaan/Dokumentasi

Kepustakaan dalam penelitian ini penulis mengacu pada beberapa tinjauan pustaka sejenis yang diakses melalui e-book, e-jurnal, laman berita, dan sumber lainnya. Dokumentasi dalam penelitian berguna untuk melengkapi data-data lapangan. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian berupa foto-foto terkait masalah yang diteliti sebagai keabsahan penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian yaitu dokumentasi keadaan fisik daerah kecamatan Tanjung Priok dan keadaan masyarakat disana.

2. Pengamatan/Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan objek yang diteliti. Dalam melakukan observasi, peneliti juga melakukan pencatatan terhadap gejala-gejala yang sedang diteliti. Kegiatan observasi atau pengamatan ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tepatnya di Kelurahan Kebon Bawang guna memperoleh gejala-gejala umum yang ditemukan dalam penelitian dan relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menanyakan langsung dan mendapatkan informasi langsung dari informannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara ini hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara mendalam jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat tetapi dengan fokus pertanyaan yang semakin terfokus dan mengarah pada ke dalaman informasi. Peneliti memberikan keleluasaan kepada informan untuk memberikan penjelasan secara aman sehingga informan tidak merasa tertekan. Kelebihan mencari data dengan wawancara, dapat diperoleh keterangan yang tidak dapat diperoleh dengan metode yang tidak menggunakan hubungan yang bersifat personal. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti dan informan yang berasal dari Tanjung Priok, tepatnya di RT 13 RW 05 Kelurahan Kebon Bawang.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Dalam proses penelitian setelah data yang dikumpulkan dan diperoleh, tahap berikutnya yang penting adalah melakukan analisis. Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang diperkaya dengan studi literatur yang

ekstensif. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari informan baik yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan maupun dari dokumen yang sudah ada, akan dianalisis oleh penulis dengan cara diinterpretasi ke dalam suatu abstraksi dan kerangka pemikiran tertentu. Hasil wawancara dan observasi merupakan data primer yang akan dianalisa dan didukung oleh data sekunder yang berasal dari buku. Analisa dilakukan dengan menggunakan teori produksi ruang dan konsep pendukung dengan data yang diperoleh di lapangan.

1.7.7 Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan sebagai pembandingan terhadap data yang diperoleh di lapangan. triangulasi data dimaksudkan untuk dapat memahami kebenaran data penelitian yang dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Teknik triangulasi ini diperlukan agar data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan tidak diolah secara mentah. Data yang diperoleh di lapangan diperlukan pengecekan melalui triangulasi data ini agar data menjadi lebih akurat dan valid kebenarannya.

Teknik triangulasi data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, serta studi pustaka terkait. Dalam penelitian ini, untuk mengkroscek ke akuratan dan

validitas data dari informan dilakukan triangulasi dengan menginformasikan hasil temuan melalui wawancara mendalam kepada Kepala Kelurahan Kebon Bawang dan Ketua PKK RW 05 sebagai perwakilan dari tokoh formal yang memiliki informasi mengenai peran dan tanggungjawab pemerintah daerah di masyarakat.

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan, maka dalam skripsi ini dikelompokkan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Permasalahan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Penelitian Sejenis, Kerangka Konseptual (Kota dan Ketidakadilan Sosial dalam Pandangan David Harvey, Konsep Ruang Sosial, Konsep Pinggiran, Masyarakat Pinggiran, dan Kesadaran Kelas Masyarakat Pinggiran), Metodologi Penelitian (Pendekatan dan Metode Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Subyek Penelitian, Peran Peneliti, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Triangulasi Data), dan Sistematika Penulisan.

BAB II MASYARAKAT RT 13/05 KEBON BAWANG DALAM KONSTELASI RUANG SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK JAKARTA UTARA, bab ini berisi Pengantar, Jakarta Utara: Dari Ruang Pluralitas hingga Kapitalisasi Global, Sejarah dan Perkembangan Masyarakat Kebon Bawang dalam Konstelasi Ruang Sosial Ekonomi dan Politik Jakarta Utara, Masyarakat RT 13/05 Kebon Bawang dalam Ketidakadilan Kota, dan Kesadaran Kelas Masyarakat RT

13/05 (Kesadaran dalam Ruang Sosial Budaya, Kesadaran dalam Ruang Politik, Kesadaran dalam Ruang Ekonomi), dan Penutup.

BAB III BENTUK PRODUKSI RUANG SOSIAL MASYARAKAT RT 13 DI TENGAH KONSTELASI RUANG SOSIAL EKONOMI JAKARTA

UTARA, bab ini berisi Pengantar, Produksi Ruang oleh Masyarakat RT 13 (Ruang Sosial Budaya: Perlawanan melalui Kegiatan Keagamaan hingga Kelompok Sosial Ketetangaan, Ruang Ekonomi: Perlawanan melalui Penguatan Ekonomi Informal, Ruang Politik: Perlawanan melalui Organisasi dan Jaringan Politik), Masa Depan Masyarakat RT 13, Orang Pinggiran: Bertahan atau Terpentak?, dan Penutup.

BAB IV JAKARTA UTARA DAN MASA DEPAN KAUM PINGGIRAN: PELAJARAN DARI MASYARAKAT RT 13, bab ini membahas Pengantar, Orang Pinggiran dan Hak Atas Kota, Refleksi Sosiologis dan Pelajaran dari Orang Pinggiran, dan Penutup.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran yang diberikan oleh penulis untuk berbagai pihak.